

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan yang akan peneliti sampaikan dalam bab ini adalah mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang proses pengelolaan pariwisata di Desa Tingkir Lor Kota Salatiga. Melihat apa yang telah ditemukan pada bab sebelumnya dapat peneliti ketahui sejauh mana proses pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Lokus atau lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kota Salatiga khususnya Kelurahan Tingkir Lor. Penanganan permasalahan pengelolaan pariwisata Desa Wisata Tingkir Lor dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah penting yang menjadi prioritas.

Proses Pengelolaan Pariwisata merupakan suatu kegiatan pengelolaan kepariwisataan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat, pemerintah serta swasta yang dimulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut teori manajemen menurut, George Terry dalam Inu Kencana Syafii (2006:49), manajemen atau pengelolaan merupakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

1.1. Proses Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor

Pariwisata merupakan sektor yang menyumbangkan banyak pendapatan bagi pemerintah. Pengelolaan pariwisata yang dilakukan dapat memberikan dampak

yang positif bagi masyarakat yaitu dengan meningkatkan pendapatan dengan melaksanakan kegiatan yang dilakukan. Tingkir Lor merupakan desa wisata yang berpotensi menjadi desa wisata unggulan di Kota Salatiga, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata di desa wisata Tingkir Lor. Proses pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pelaksanaan dan pengawasan.

1.1.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu bagian elemen dasar dalam manajemen. Perencanaan sendiri merupakan tahapan paling penting dan paling utama fungsi manajemen, terutama dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Tingkir Tor Kota Salatiga. Perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam manajemen pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor. Menurut teori George. R. Terry (Hasibuan, 2006: 92) perencanaan merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kelurahan Tingkir Lor ditetapkan sebagai desa wisata, karena di Kota Salatiga sendiri kurang destinasi wisata. Penetapan Kelurahan Tingkir Lor sebagai lokasi pengembangan desa wisata dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Walikota pada tahun 2015. Pertimbangan penetapan Kelurahan Tingkir Lor sebagai desa wisata karena kurang lebih 60% masyarakat mempunyai usaha dibidang konveksi. Adanya potensi yang dimiliki

Tingkir Lor tersebut membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengembangkan destinasi wisata yang berbasis potensi lokal.

1. Menentukan tujuan

Perencanaan yang baik dimulai dengan adanya tujuan yang jelas. Pengetahuan terhadap tujuan merupakan hal mutlak yang seharusnya bukan hanya mengetahui namun juga harus dipahami. George R. Terry dalam Hasibuan (2006:96) menjelaskan tujuan merupakan suatu sasaran manjerial yaitu tujuan yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas serta memberikan arahan pada usaha-usaha seseorang manajer (pimpinan). Tujuan yang jelas maka akan mengetahui sejauh mana pekerjaan akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga tujuan yang diinginkan harus dibuat sejelas-jelasnya agar dapat dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dalam mengelola desa wisata Tingkir Lor sudah menentukan tujuan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari tujuannya yaitu meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Salatiga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengembangan industri konveksi serta potensi lokal yang dimiliki Desa Wisata Tingkir Lor.

2. Merumuskan anggaran

Perencanaan anggaran dalam pengelolaan desa wisata sangat diperlukan, dengan adanya anggaran rincian anggaran yang jelas maka proses pengelolaan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga,

diperlukan anggaran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga) mengingat masih kurangnya anggaran untuk pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor. Anggaran yang diterima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga terlalu kecil, bahkan untuk anggaran pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor dari pemerintah kota cenderung kurang. Keterbatasan anggaran untuk melakukan promosi obyek wisata, menyebabkan dinas harus bekerja ekstra untuk mendapatkan anggaran. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga melakukan kerjasama dengan OPD-OPD terkait serta mengajukan proposal ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran pengelolaan pariwisata.

3. Menyusun target atau skala prioritas

Pencapaian tujuan dalam pengelolaan desa wisata diperlukan skala prioritas untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian skala prioritas yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dalam untuk saat ini yaitu penataan atau pengembangan manajemen kelembagaan yang ada di Desa Wisata Tingkir Lor. Penataan manajemen kelembagaan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja pengelola Desa Wisata Tingkir Lor sehingga dapat mengembangkan desa wisata dan menarik pengunjung atau wisatawan yang lebih banyak.

1.1.2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan. Pengorganisasian menurut teori George R. Terry dalam Hasibuan (2006: 119) merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

1. Pembagian dan Pengelompokan Pekerjaan

Kegiatan pengorganisasian diawali dengan mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembagian dan pengelompokan pekerjaan. Pembagian dan pengelompokan pekerjaan haruslah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan mendapatkan hasil yang maksimal. kegiatan pembagian dan pengelompokan pekerjaan didalamnya terdapat pula kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu mempermudah mencapai tujuan.

Pengorganisasian yang dilakukan pada proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor dilakukan sejak tahun 2015 oleh DISBUDPAR dengan dibentuknya

POKDARWIS. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dalam pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor membentuk sebuah organisasi POKDARWIS untuk mengurus pengelolaan desa wisata. Organisasi pengelola Desa Wisata Tingkir Lor atau POKDARWIS terdiri dari masyarakat sekitar yang memiliki pekerjaan untuk mengelola potensi pariwisata yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga), POKDARWIS dalam pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor masih belum sesuai yang diharapkan, dikarenakan tidak berjalannya organisasi yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan. Kepengurusan organisasi pengelola desa wisata tidak berjalan dikarenakan kesibukan masing-masing anggotanya. Selama ini kepengurusan organisasi dikelola oleh anggota yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, sehingga mengakibatkan kurang fokusnya dalam menangani proses pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor. Masalah lain dalam tahap pengorganisasian di Desa Wisata Tingkir Lor ini adalah belum adanya proses reorganisasi yang dilakukan, sehingga memberikan dampak kurang berjalannya organisasi yang ada. Proses reorganisasi perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja dalam sebuah organisasi. Reorganisasi dalam kepengurusan organisasi pengelola desa wisata tidak kunjung dilakukan dikarenakan kebibukan pengurus itu sendiri. Selain itu masyarakat Desa Wisata Tingkir Lor belum ada yang benar-benar mau mengurus pengelolaan pariwisata secara sukarela. Masyarakat sekitar lebih memilih pekerjaan sendiri atau mengelola usaha yang dimiliki daripada melakukan kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor.

2. Distribusi Wewenang

Pengoorganisasian berarti menyatukan berbagai macam sumber daya dan mengatur orang-orang di dalam organisasi dengan teratur. Mengatur orang-orang tersebut diperukan otoritas atau wewenang. Otoritas atau wewenang (*outhority*) adalah kekuasaan yang telah diahkan oleh organisasi. Otoritas atau wewenag biasanya di distribusikan oleh seorang pimpinan kepada bawahanya. Distribusi dilakukan untuk bertindak dan memerintah orang atau sekelompok orang untuk melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga), pendistribusian wewenang pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dapat diketahui dengan belum jelasnya pemberian otoritas atau wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan karena tidak adanya SK Kepengurusan organisasi pengelola desa wisata.

3. Koordinasi

Koordinasi merupakan proses integrasi dari kegiatan-kegiatan individu dan unit-unit kedalam suatu bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Integritas merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga kebetulan pemikiran dan kesatuan tindakan yang arah pada suatu sasaran yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Koordinasi dilakukan agar mempunyai keselarasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan dimaksimalkan agar para atasan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab 3 (tiga), proses koordinasi belum dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui dari kurangnya bentuk koordinasi yang dilakukan antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kelurahan Tingkir Lor, pengelola desa wisata serta masyarakat. Belum terjadinya koordinasi yang baik antar pihak dalam proses pengelolaan desa wisata tingkir lor memberikan dampak kurang berjalannya kegiatan yang dilakukan.

1.1.3. Pengarahan/Pelaksanaan

Pengarahan merupakan kegiatan melalui komunikasi serta memberikan motivasi kepada semua anggota yang telah diberi tugas agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan menurut teori G.R Terry dalam Hasibuan (2006:183) merupakan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Tahap pengarahan dalam proses pengelolaan di Desa Wisata Tingkir Lor yang dilakukan dapat dilihat mencakup pemberian motivasi, pengembangan potensi, mengupayakan partisipasi.

1. Pemberian Motivasi

Motivasi dapat dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri seseorang. Menurut Sukanto dan Handoko dalam Amirullah (2004: 213) mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut motivasi

merupakan apa yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan dalam pencapaian tujuan. Proses pengelolaan desa wisata diperlukan motivasi supaya masyarakat terus menjaga dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi desa wisata. pemberian motivasi dalam hal ini sifatnya membangun untuk meningkatkan gairah atau dorongan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor pemberian motivasi ini sangat penting dilakukan. Mengingat masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan desa wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga), baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga maupun pengurus pengelola desa wisata Tingkir Lor sudah melakukan pemberian motivasi dengan baik. Motivasi yang diberikan bertujuan untuk memberikan bentuk dukungan atau semangat supaya masyarakat terus melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan potensi yang ada di Desa Wisata Tingkir Lor. Bentuk motivasi yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yaitu dengan memberikan arahan mengenai penataan tempat usaha masyarakat sekitar. Penataan dilakukan dengan cara memisahkan antara tempat untuk produksi serta tempat untuk menaruh barang yang sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Penataan usaha yang baik diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung maupun membeli hasil produk yang ada.

2. Pengembangan Potensi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Kepariwisataan mengandung suatu potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, sehingga untuk menemukan potensi kepariwisataan disuatu daerah diperlukan pedoman tentang apa yang sedang dicari oleh wisatawan. Potensi menjadi hal yang harus diperhatikan dan dilihat lebih jauh lagi, agar semua kelebihan dan potensi yang bisa dikembangkan dapat dimaksimalkan secara sempurna. Pengembangan potensi tersebut tentu semuanya tidak terlepas dari peran semua pihak yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Potensi suatu daerah dan kepariwisataan merupakan dua hal yang memiliki kaitan erat keduanya dapat bergerak maju untuk melakukan pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Kepariwisataan dalam UU No. 10 Tahun 2009 merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pariwisata merupakan suatu objek yang mempunyai kekuatan kuat untuk dikembangkan dan dapat memberikan timbal balik yang positif terhadap wisata.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga), pengembangan potensi yang sudah dilakukan di Desa Wisata Tingkir Lor yaitu peningkatan mutu kualitas hasil usaha-usaha yang ada. Bidang usaha konveksi meningkatkan kualitas hasil produksinya dengan cara memperbaiki tingkat bahan yang digunakan serta kerapihan dari jahitannya. Peningkatan kualitas mutu pada bidang usaha makanan dilakukan dengan cara memperbaiki dari mulai segi bahan-bahan yang digunakan, cara pengelolaan, sampai dapat proses pengemasan. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga pada tahun akan mencoba melakukan pengembangan potensi dengan memanfaatkan aliran sungai Cengek. Aliran sungai Cengek akan coba dikembangkan menjadi destinasi *river tubing* yang akan mengundang wisatawan datang berkunjung.

3. Mengupayakan adanya Partisipasi

Mardikanto dkk (2013:82) menyatakan bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat perwujudan dari kesadaran dan kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga memuat keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Partisipasi masyarakat yang akan dibahas merupakan derajat partisipasi masyarakat, maksudnya sampai dijenjang atau derajat manakah

partisipasi masyarakat Kelurahan Tingkir Lor dalam pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor ini. tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program atau kegiatan yang mendukung pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor berdasarkan usaha-usaha dan kewenangan-kewenangan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk menjalankan program secara mandiri tetapi tetap terawasi, semakin tinggi pula tingkat atau derajat partisipasi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah masih memegang kewenangan penuh dalam menjalankan program dan kegiatan, pertukaran informasi dan interaksi antar masyarakat dan pemangku kepentingan yang rendah, maka tingkat partisipasi masyarakat juga rendah.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga mengatakan bahwa sudah ada partisipasi dari pihak swasta khususnya Hotel Laras Asri. Hotel Laras Asri sendiri menyediakan paket perjalanan wisata yang salah satu destinasi wisatanya adalah Desa Wisata Tingkir Lor. Wisatawan yang menginap di Hotel Laras Asri akan dibawa berkeliling untuk menikmati pemandangan maupun wisata belanja produk hasil industri yang ada di Desa Wisata Tingkir Lor. Akan tetapi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan pihak Hotel Laras Asri belum menjalin koordinasi yang baik dengan pihak pengelola Desa Wisata Tingkir Lor, hal ini dibuktikan dengan apabila ada tamu dari Hotel Laras Asri datang berkunjung tidak melalui pihak pengelola dulu. Partisipasi masyarakat Kelurahan Tingkir Lor juga dirasa masih cukup rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa wisata Tingkir Lor ini dapat

dibutikan dengan kurang berhasilnya pelatihan yang diberikan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga mengatakan masyarakat Kelurahan Tingkir Lor cukup aktif pada saat adanya pelatihan yang dilakukan akan tetapi setelah pelatihan itu selesai hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Masyarakat Tingkir Lor cenderung akan menjalankan kegiatan seperti biasa sebelum adanya pelatihan yang dilakukan.

1.1.4. Pengawasan

Pengawasan atau disebut pengendalian merupakan fungsi manajemen berupa mengadakan peneltian, dan jika perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan sesuai tujuan yang telah digariskan semula. Menurut teori G.R Terry dalam Hasibuan (2006: 242) pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentu, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengawasan atau pengendalian dalam proses pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor dapat dilihat dari standar pengawasan, hambatan, serta upaya mengatasi hambatan yang ada.

1. Standar pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen, sangat penting dalam menentukan pelaksanaan proses manajemen. Menurut Sondang Siagian dalam Syafie (2010: 82) mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut pengawasan dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai cara atau teknik pengendalian yang tepat untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Proses pengawasan juga sangat dibutuhkan standar pengawasan yang jelas, jika tidak ada standar pengawasan maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa saja tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga), standar pengawasan dalam pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor belum dibuat atau ditetapkannya secara pasti. Pengawasan langsung maupun tidak langsung belum begitu dilakukan mulai dari pihak Kelurahan Tingkir Lor namun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.

2. Mengidentifikasi Hambatan

Proses pengawasan yang telah dilakukan pada kegiatan, terdapat suatu perubahan yang ditimbulkan baik kemajuan maupun kemunduran. Apabila perubahan yang ditimbulkan mengarah ke kemajuan maka dapat dikatakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, apabila perubahan yang ditimbulkan mengarah ke kemunduran maka telah terjadi penyimpangan atau hambatan didalam pelaksanaan kegiatan. Penyimpangan tersebut harus dipahami oleh seseorang pemimpin agar dapat memberikan solusi terbaik di masa mendatang.

Proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor terdapat beberapa penyimpangan dalam setiap prosesnya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat di indentifikasi setelah dilakukannya kegiatan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga telah mengatakan bahwa dalam proses pengelolaan desa wisata hambatan yang sering ditemui adalah pada partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga), pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor kaitanya dengan penyimpangan atau hambatan yang terjadi terletak pada tidak berjalannya kepengurusan organisasi pengelola desa wisata dalam melakukan kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor. Hambatan atau penyimpangan yang lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat serta kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan desa wisata. rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam kegiatan pengelolaan desa wisata dapat dilihat dari bahwa masyarakat Desa Wisata Tingkir Lor melakukan kegiatan tersebut atas dasar arahan atau ajakan dari pihak kelurahan maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.

3. Upaya

Pengendalian atau pengawasan itu sendiri dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki suatu kesalahan. Kesalahan yang terjadi dapat menyebabkan penyimpangan yang cukup fatal. Apabila terjadi penyimpangan, maka langkah yang harus diambil adalah dengan melakukan upaya tindakan koreksi sebagai cara mengatasi penyimpangan tersebut. Kegiatan pengelolaan desa wisata secara umum masalah yang ada yaitu rendahnya partisipasi masyarakat,

sehingga diperlukan upaya tindakan koreksi agar kegiatan pengelolaan desa wisata dapat berjalan dengan baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dalam memberikan upaya tindakan koreksi terhadap masalah tersebut adalah dengan melakukan pemantauan serta melakukan pendampingan kepada pihak pengelola maupun masyarakat Desa Wisata Tingkir Lor.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bab 3 (tiga), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga mengatasi hambatan yang ada melakukan upaya pengarahan serta motivasi kepada masyarakat Desa Wisata Tingkir Lor untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan desa wisata dengan baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga juga memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta melakukan pendampingan dalam proses kegiatan pengelolaan. Pihak Kelurahan Tingkir Lor juga melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam kegiatan pengelolaan desa wisata, hal ini dilakukan dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi serta kepedulian masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata.

1.2. Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor

Proses pengelolaan di Desa Wisata Tingkir Lor sendiri dipengaruhi banyak faktor baik faktor pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan desa wisata ada lima (5) faktor yaitu faktor masyarakat, alam, sejarah, keuangan serta SDM. Berdasarkan hasil dari wawancara yang menjadi faktor pendukung pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor

yaitu faktor alam dan faktor sejarah sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu faktor masyarakat, faktor keuangan serta faktor SDM.

1.2.1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan hal-hal yang memengaruhi proses pengelolaan pariwisata menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang menjadi faktor pendorong dalam proses pengelolaan di Desa Wisata Tingkir Lor yaitu faktor alam dan faktor sejarah.

1. Faktor Alam

Menurut Nyoman S. Pendit (2016:30) faktor alam merupakan potensi alam yang menjadi faktor dalam keputusan pengembangan daerah tujuan wisata yang meliputi keindahan alam serta iklim yang mempengaruhinya. Alam di Desa Wisata Tingkir Lor yang berpotensi dalam proses pengelolaan pariwisata merupakan pemandangan hamparan lahan persawahan yang berlatar belakang Gunung Merbabu. Pada awal ditetapkannya area persawahan juga dijadikan sebagai kegiatan *outbond* tentang tata cara menanam padi. Selain itu ada juga potensi dari aliran sungai Cengek yang sampai saat ini belum dimanfaatkan potensinya.

2. Faktor Sejarah

Menurut Nyoman S. Pendit (2016:30) sejarah merupakan sebuah peninggalan pada suatu daerah atau wilayah yang menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat dikembangkan seperti bangunan bekas istana, tempat ibadah, kota tua, bangunan purbakala, legenda dan lain sebagainya. Faktor sejarah di Desa

Wisata Tingkir Lor dipengaruhi dengan keberadaan makam Kyai Abdul Wahid sebagai penyebar agama islam di Kota Salatiga. Tingkir Lor juga terdapat pondok pesantren sehingga dapat juga disebut sebagai pariwisata *muslim friendly*, yang menyuguhkan nilai-nilai muslim dalam proses pengelolaan pariwisata yang ada disana.

1.2.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan dapat menghentikan proses pengelolaan pariwisata menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan di Desa Wisata Tingkir Lor yaitu faktor masyarakat, faktor keuangan serta faktor SDM.

1. Faktor Masyarakat

Menurut Nyoman S. Pendit (2016:30) masyarakat lokal adalah pihak yang paling akan menerima dampak dari kegiatan wisata yang dikembangkan di daerahnya. Oleh karena itu aspirasi masyarakat sangatlah penting dan komponen permintaan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan wisata. Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menimbulkan hubungan saling menguntungkan antara pengelola pariwisata dengan masyarakat sehingga menjadi sebuah multiplier efek yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Proses pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor tidak didukung dengan partisipasi masyarakatnya. Masyarakat Tingkir Lor kurang peduli dengan adanya pengembangan pariwisata yang ada, hal ini dibuktikan dengan dirusakny

fasilitas gasebo yang dibangun oleh DISBUDPAR serta kurang kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungannya. Sikap masyarakat yang belum terdidik serta sadar mengenai potensi yang dimiliki Desa Wisata Tingkir Lor mengakibatkan sikap acuh atau apatis tentang proses pengelolaan pariwisata yang ada.

2. Faktor Keuangan

Menurut Nyoman S. Pendit (2016:30) keuangan merupakan biaya yang tidak dapat dipungkiri sangatlah dibutuhkan bahwa dalam pengembangan pariwisata, dalam pengembangan pariwisata tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk proses pengelolaannya. Investor/swasta merupakan salah satu pihak yang dapat diandalkan dalam pengembangan pariwisata. Sedikitnya alokasi anggaran dana di Kota Salatiga mengakibatkan proses pengembangan pariwisata sedikit terganggu. Pengelolaan desa wisata juga tidak mendapatkan dana sedikitpun dari Kelurahan Tingkir Lor. Pihak DISBUDPAR sendiri tidak memiliki anggaran khusus untuk pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor. Keterbatasan dana untuk proses pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor menyebabkan DISBUDPAR harus bekerja untuk mendapatkan anggaran. DISBUDPAR mengajukan proposal ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran pengelolaan pariwisata serta juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait demi keberhasilan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor.

3. Faktor SDM

Menurut Nyoman S. Pendit (2016:30) SDM merupakan ketersediaan sumber daya yang terdidik dan terlatih sangat mempengaruhi dalam pengembangan

dan perencanaan pariwisata. Kebutuhan pasar akan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih dan berkompeten dalam bidang pariwisata sangat dibutuhkan. SDM yang bukan berlatarbelakang pendidikan pariwisata menimbulkan kendala dalam proses pengelolaan Di Desa Wisata Tingkir Lor. Kurangnya pengetahuan SDM mengenai tentang proses pengelolaan desa wisata yang baik mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pengelolaan yang dilakukan.

4. Kurang komitmen dari pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga yaitu kurangnya komitmen dari pemerintah. Pemerintah Kota Salatiga dalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor cenderung setengah-setengah melakukannya.